

PROPOSAL
PENGAJUAN TAMBAHAN MODAL USAHA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) POTENSIAL MEMILIKI USAHA EKONOMI PRODUKTIF
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SRAGEN



PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 1043
2021

PENGAJUAN TAMBAHAN MODAL USAHA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) POTENSIAL MEMILIKI USAHA EKONOMI PRODUKTIF
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SRAGEN

A. LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN USAHA

Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut PKH, adalah bantuan tunai bersyarat yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Misi besar kesuksesan PKH adalah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Semua terlihat nyata mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 10,12% pada bulan September 2017 menjadi 9,82% pada bulan Maret 2018 dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2018).

Sebagai bantuan bersyarat, PKH hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan layanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pedampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan sebagai tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan bisnis PKH, perluasan target penerima manfaat dan penguatan program komplementer. Keluarga Penerima Manfaat PKH harus dipastikan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Rumah tidak layak huni (Rutilahu), Pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya. Semua ini bertujuan agar keluarga miskin segera keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera.

Keberjalanan PKH selama 11 tahun dinilai sebuah keberhasilan dilihat dari angka Graduasi Mandiri Sejahtera. Graduasi Mandiri Sejahtera yakni lulus dari PKH karena sudah mampu secara ekonomi dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 2,3 persen dari total 6 juta peserta graduasi. Pada tahun 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen graduasi dari 10 juta KPM. Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 800.000 atau 8 persen graduasi dari 10 juta KPM (Kholis, 2019).

Dilihat dari capaian diatas mendorong PKH untuk memutus rantai kemiskinan dengan harapan membawa semangat kemandirian. Sehingga, makna dari bantuan sosial bukan hanya sumbangan semata namun lebih kearah pemberdayaan masyarakat miskin dengan tujuan menciptakan kemandirian. Bantuan PKH dipergunakan untuk pemenuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan/perbaikan gizi, dan untuk kebutuhan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan PKH yaitu meningkatkan kualitas manusia (SDM), menciptakan generasi berkualitas, mampu bersaing dalam mengakses lapangan pekerjaan, dan dapat menjadi subjek pembangunan.

Keberjalanan PKH merupakan fenomena sosial dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia. PKH merupakan salah satu wujud pemberdayaan masyarakat miskin yang dinilai berhasil. PKH membantu kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak keluarga miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menunjukan bahwa terdapat peran yang signifikan antara pendamping PKH dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Semakin baik peran pendamping PKH melaksanakan tugasnya maka semakin baik juga dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga.

Kami berharap dengan adanya pengajuan proposal “TAMBAHAN MODAL USAHA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) POTENSIAL MEMILIKI USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN SRAGEN” dapat diterima Bapak Direktur Utama BPRS Syariah Sukowati Sragen.

A. MANFAAT EKONOMI BAGI KPM PKH

Adapun manfaat ekonomi dari usaha ini adalah :

- Manfaat Langsung
 - Memperoleh pendapatan dari operasional usaha
 - Mencapai kemandirian secara ekonomi
 - Menambah modal usaha
- Manfaat Tidak Langsung
 - Memberikan semangat kpm pkh untuk segera graduasi mandiri sejahtera.
 - Memberikan peluang usaha lebih berkembang ditengah pandemic covid-19.

B. MANFAAT SOSIAL

- Membantu perputaran perekonomian masyarakat prasejahtera.
- Membuka dan menambah wawasan kpm pkh terhadap permodalan perbankan.
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan

C. TENTANG PKH SRAGEN

Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Sragen dilaksanakan di Kabupaten Sragen mulai tahun 2011. Nama PPKH Kabupaten Sragen mulai digunakan tahun 2016 yang sebelumnya tahun 2011-2015 bernama Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH). PPKH Kabupaten Sragen sekarang melebur menjadi satu dengan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten. Sekretariat masih bertempat di Gedung Lansia Jl. Ronggowarsito No.22b Sragen.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/ NIP/ NPWP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	Drs. JOKO SARYONO, M.Pd NIP. 19610612 198803 1 011 NPWP. 34.211.224.0.526.000	Kepala Dinas Sosial Kab. Sragen	Pengarah
2	dr. FINURIL HIDAYATI, M.P.H NIP. 19750414 200501 2 010 NPWP. 87.289.539.6-528.000	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Sragen	Ketua
3	SRI RATNA DEKANINGSIH NIP.19630727 198608 2 004 NPWP. 78.632.492.1-528.000	Kasi. Perlindungan Sosial Dinas SosialKab. Sragen	Sekretaris
4	M. SYAIFUL HUDA NIP. 19751017 200701 1 007	Pelaksana pada Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kab. Sragen	Anggota

	NPWP. 88.154.121.3.528.000		
5	CAHYO HANDRIS SETIYAWAN, ST NPWP. 66.688.191.4-528.000	Koordinator Kabupaten PPKH Kab. Sragen	Anggota
6	NASRUL KURNIAWAN, AMd NPWP. 66.690.050.1-528.000	Koordinator Kabupaten PPKH Kab. Sragen	Anggota

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) PKH Kabupaten Sragen terdiri dari Koodinator Kabupaten, Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial PKH, sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TOTAL SDM
1	Koordinator Kabupaten (Korkab)	2
2	Administrator Pangkalan Data (APD)	9
3	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Gemolong	7
4	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Gesi	5
5	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Gondang	5
6	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Jenar	8
7	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Kalijambe	9
8	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Karangmalang	5
9	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Kedawung	6
10	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Masaran	8
11	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Miri	7
12	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Mondokan	9
13	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Ngrampal	4
14	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Plupuh	7
15	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sambirejo	6
16	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sambung Macan	7
17	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sidoharjo	3
18	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sragen	3
19	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sukodono	5
20	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sumberlawang	10
21	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Tangen	7
22	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Tanon	9
Total		141

Data peserta PKH di Kabupaten Sragen per Maret 2021 sebagai berikut:

No	KECAMATAN	Jumlah Usia Dini	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Lansia	Jumlah Disabilitas	Jumlah Anak SD	Jumlah Anak SMP	Jumlah Anak SMA	Jumlah KPM
1	GEMOLONG	511	13	711	40	1018	619	680	2166
2	GESI	190	9	629	27	452	282	273	1186
3	GONDANG	272	8	569	43	577	382	403	1445
4	JENAR	374	27	977	32	839	559	462	2154
5	KALIJAMBE	565	26	941	18	1124	757	749	2560
6	KARANGMALANG	182	6	433	14	535	345	329	1150
7	KEDAWUNG	194	7	575	12	562	384	333	1321
8	MASARAN	542	43	637	21	1154	762	719	2221
9	MIRI	495	36	895	19	949	597	488	2066
10	MONDOKAN	506	29	861	32	998	620	432	2211
11	NGRAMPAL	171	3	411	12	444	306	295	1057
12	PLUPUH	476	24	870	19	986	586	603	2236
13	SAMBIREJO	204	6	657	23	501	369	329	1350
14	SAMBUNG MACAN	374	22	805	30	805	561	587	2046
15	SIDOHARJO	149	4	343	7	357	293	248	911
16	SRAGEN	106	1	175	10	318	280	267	754
17	SUKODONO	264	11	785	28	527	364	349	1477
18	SUMBERLAWANG	660	18	1254	20	1384	967	887	3104
19	TANGEN	308	23	641	5	579	365	278	1371
20	TANON	577	21	1278	28	1175	822	778	3041
	Grand Total	7120	337	14447	440	15284	10220	9489	35827

D. PROSES PELAKSANAAN PROGRAM

1. Pembentukan Pengelola Inovasi Bantuan Stimulan UEP
2. Pengajuan proposal calon penerima Bantuan Stimulan UEP dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen kepada PT BPRS Sukowati Sragen
3. Tim dari PT BPRS Sukowati Sragen melakukan survey terhadap data masing - masing dari segi usaha yang dimiliki, tempat tinggal, kepemilikan aset dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
4. Komite dan laporan atas hasil survey yang telah dilaksanakan.
5. Pemaparan dan pemberitahuan nominal dana bantuan kepada Pendamping PKH
6. Pencairan dana bantuan melalui rekening di PT BPRS Sukowati Sragen
7. Wisuda Graduasi KPM PKH oleh Bupati Sragen

BAB III

PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu mempertimbangkan permohonan tersebut sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sragen terus berkembang usaha ekonomi produktifnya. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

Sragen, Maret 2021

Sekretariat PPKH Kabupaten Sragen